

Operasi Keselamatan Progo Libatkan 140 Personel

WATES (KR) - Untuk cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Polres Kulonprogo melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Progo 2023 di halaman Mapolres setempat, Selasa (7/2). Apel dipimpin Kapolres Kulonprogo, AKBP Muharomah Fajarini dan diikuti personel Polres Kulonprogo.



KR-Dani Ardiyanto

AKBP Muharomah Fajarini menyematkan pita sebagai tanda dimulainya Operasi Keselamatan Progo 2023.

Kapolres Kulonprogo, AKBP Muharomah Fajarini didampingi Kasat Lantas Polres Kulonprogo, AKP Johan Rinto Damar Jati menyampaikan, apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Progo 2023 dilaksanakan sebagai pengecekan akhir kesiapan personel yang telah ditunjuk dan sarana prasarana pendukung. Giat ini dilak-

sanakan selama 14 hari, pada 7-20 Februari 2023.

"Giat ini melibatkan 140 personel. Kami mengedepankan upaya preventif, persuasif, humanis, edukatif dan penegakan hukum menggunakan ETTLE serta blangko teguran. Targetnya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu

lintas," kata AKBP Muharomah Fajarini.

Sasarannya kendaraan menggunakan knalpot blombongan, kendaraan tidak sesuai spesifikasi, plat kendaraan tidak sesuai TNKB, kendaraan pribadi menggunakan sirine, strobo dan rotator serta tidak menggunakan helm SNI. (Dan)

Operasi Keselamatan Berlangsung 14 Hari



KR-Bambang Purwanto

Upacara Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Progo 2023 di Gunungkidul.

WONOSARI (KR) - Polres Gunungkidul menggelar operasi bersandi Operasi Keselamatan Progo 2023 dan akan dilakukan selama 14 hari dari Selasa (7/2) sampai Selasa (20/2) mendatang.

Operasi Gelar Pasukan dilaksanakan di halaman Mapolres dipimpin Kapolres Gunungkidul, AKBP Edy Bagus Sumantri SIK. Dengan melibatkan TNI/Polri, Dishub dan Satpol PP Pemkab Gunungkidul.

Kapolres Gunungkidul AKBP Edy Bagus Sumantri

SIK dalam sambutannya menyatakan bahwa apel Gelar Pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Operasi Keselamatan Progo 2023 dapat terselenggara secara optimal dan sinergi dalam rangka menjelang Bulan Suci Ramadhan 2023. Adapun operasi tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan untuk mewujudkan kamseltibcarlantas. "Konsep Pelaksanaan Operasi mengedepankan kegiatan Preventif, Edukatif, dan Persuasif serta humanis," ujarnya. (Bmp)

HADAPI PELAKSANAAN ASPD

KKG Wonosari Tingkat Kompetensi Guru

WONOSARI (KR) - Mendorong kompetensi guru dan persiapan menghadapi Asesment Standarisi Pendidikan Daerah (ASPD), Kelompok Kerja Guru (KKG) Kelas VI Kapanewon Wonosari menggelar Berbagi Praktik Baik di Pawon Alas Rest Area Bunder, Playen, Senin (6/2). Kegiatan juga didukung Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Korwilbiddik) Kapanewon Wonosari.

"Melalui peningkatan kompetensi guru, nantinya akan mampu mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi AS-

PD," kata Ketua Korwilbiddik Wonosari Slamet Sutoyo MM.

Kegiatan mengupas Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA diikuti guru dari 41 SD dan 7 MI se Kapanewon Wonosari. Diungkapkan, bentuknya merupakan berbagi praktik baik. Bagaimana sekolah yang sudah bagus, bisa memberikan ilmu bagi para guru-guru dalam mempersiapkan anak didik menghadapi ASPD. Tentu targetnya ke depan, prestasi para peserta didik ini akan semakin meningkat. (Ded)

DITERJANG ANGIN KENCANG

1 Rumah Ambruk, 2 Pekerja Selamat

WONOSARI (KR)-Hujan deras disertai angin yang terjadi di Kapanewon Saptosari kabupaten Gunungkidul mengakibatkan rumah Limasan milik Sulisty (45) warga Kalurahan Manding, Kapanewon Sewon, Bantul yang berada di Jetis, Saptosari roboh.



KR-Istimewa

Rumah yang roboh diterjang angin kencang di Saptosari.

Rumah yang baru dibangun dan berada di pinggir Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) rata dengan tanah. "Tidak menimbulkan korban dan kerugian mencapai Rp 75 juta," kata Kapolsek Saptosari AKP Kusnan Priyono Selasa (7/2).

Informasi di lokasi kejadian menyatakan sebelum peristiwa ambruknya rumah korban, wilayah Kapanewon Saptosari, Gunungkidul diguyur hujan deras disertai angin kencang. Selain merobohkan sejumlah pohon juga me-

rusak sejumlah rumah milik warga. Satu rumah yang dalam proses dibangun dan belum ditempati milik Sulisty tidak luput dari terjangan angin hingga roboh rata dengan tanah. "Dua orang pekerja yang sedang mengerjakan rumah tersebut melihat angin besar dari utara menerjang rumah tersebut hingga ambruk," ucap Kapolsek Saptosari.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul

Purwono membenarkan kejadian tersebut dan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. "Terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana longsor, banjir dan angin kencang. Ter-

lebih saat ini intensitas curah hujan masih tinggi dan sering terjadi bencana longsor maupun angin kencang. "Kami mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan," tuturnya. (Bmp)

DZIKIR SHOLAWAT SEMARAK 1 ABAD NU

7 Ranting MWCNU Karangmojo Dilantik

WONOSARI (KR) - Menyemarakkan 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU), MWCNU Karangmojo menggelar Dzikir Sholawat di Gedung MWCNU Srimpi, Senin (6/2) malam. Bersamaan dilantik 7 pengurus ranting meliputi Kalurahan Karangmojo, Ngawis, Ngipak, Bendungan, Wiladeg, Gedangrejo dan Jatiayu masa khidmat 2023-2028. "Dzikir sholawat dan pelantikan pengurus ranting ini dalam rangka menyemarakkan 1 Abad NU. Alhamdulillah MWCNU Karangmojo juga telah melaksanakan berbagai program dalam rangka 1 Abad NU diantaranya Muqodaman, mengirimkan



KR-Dedy EW

Pelantikan Ranting MWCNU Karangmojo.

bantuan korban gempa di Cianjur senilai Rp 38 juta," kata Ketua MWCNU Karangmojo Sugiyo MPD. Kegiatan dihadiri Pengu-

rus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gunungkidul KH Masduqi, KH Ali Ridlo, Kyai Jafar Abdus Syakur. Juga Panewu Karangmojo

H Marwatahadi, ulama dan ribuan jamaah. Dzikir sholawat juga dimeriahkan Grup Hadroh Adem Ayem dan Gus Wahid. Sedangkan ceramah disampaikan Drs KH Hendry Sutopo dari Krapyak. Sebanyak 7 ranting dikukuhkan oleh PCNU Gunungkidul dan diberikan bendera NU.

"NU terus berjuang dan berkarya. Memberikan kontribusi pembangunan masyarakat bangsa dan negara," jelasnya. Dalam ceramahnya KH Hendry Sutopo mengajak jamaah untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. (Ded)

KEMISKINAN EKSTREM DI KULONPROGO

Perlu Penanganan Terpadu dan Berkelanjutan

KOKAP (KR) - Sejumlah wilayah di Kabupaten Kulonprogo mengalami kemiskinan ekstrem. Anggota DPRD DIY Lilik Syaiful Ahmad menjelaskan, banyak hal yang perlu dilakukan dalam mengatasi kemiskinan tersebut.

"Aksesibilitas sangat penting, jalan-jalan propinsi yang rusak harus diperbaiki, mekanismenya bisa ditempuh dengan banyak cara, khususnya akses jalan menuju destinasi pariwisata. Visi misi DIY pariwisata, pendidikan dan kebudayaan," katanya saat reses DPRD DIY di Kalurahan Hargomulyo, Kokap belum lama ini.

Dijelaskan, salah satu cara pengentasan kemiskinan dengan pendidikan tinggi. Tapi menjadi dilematis ketika lapangan pekerjaan dan peluang usaha tidak tersedia. Lilik menegaskan, sudah saatnya Pemda DIY menggarap serius tentang pendidikan, pariwisata, budaya dan industri. Hal itu bisa menggunakan parameter yang ada.

"Di Kulonprogo sudah ada pelabuhan meskipun mangkrak. Selain itu juga ada bandara yang mampu didarati pesawat terbesar dan terberat, ketika industri tergarap cargo YIA sudah memadai, bisa untuk pengiriman bahan baku atau bahan jadi semua bisa masuk dan keluar melalui bandara," jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkan, sesuai UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, kawasan Temon, Kokap dan Wates menjadi penyangga pengembangan Yogyakarta International Airport (YIA) seharusnya sudah siap. Jangan sampai potensi yang ada justru menjadi musibah bagi masyarakat setempat. Pembangunan jalan tol perlu disikapi dan pendampingan pengelolaan uang sejak awal pembebasan perlu dilakukan agar warga lokal tidak hanya jadi penonton.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan, em-

ter yang ada. "Di Kulonprogo sudah ada pelabuhan meskipun mangkrak. Selain itu juga ada bandara yang mampu didarati pesawat terbesar dan terberat, ketika industri tergarap cargo YIA sudah memadai, bisa untuk pengiriman bahan baku atau bahan jadi semua bisa masuk dan keluar melalui bandara," jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkan, sesuai UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, kawasan Temon, Kokap dan Wates menjadi penyangga pengembangan Yogyakarta International Airport (YIA) seharusnya sudah siap. Jangan sampai potensi yang ada justru menjadi musibah bagi masyarakat setempat. Pembangunan jalan tol perlu disikapi dan pendampingan pengelolaan uang sejak awal pembebasan perlu dilakukan agar warga lokal tidak hanya jadi penonton.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan, em-



KR-Asrul Sani

Lilik Syaiful Ahmad saat reses di Kalurahan Hargomulyo.

pat kapanewon di kabupaten ini mengalami kemiskinan ekstrem versi Badan Pusat Statistik (BPS). Diperlukan koordinasi yang baik antar-organisasi perangan daerah/OPD dalam upaya penanganan secara terpadu dan berkelanjutan.

"Empat kapanewon yang ditetapkan mengalami kemiskinan ekstrem yakni Kokap, Pengasih, Sentolo dan Samigaluh. Hal ini didasarkan pada ukuran tingkat konsumtif dan kebutuhan kalori yang ditetapkan BPS. Ke depan harus dirumuskan program-program pengentasan kemis-

kinan yang tepat," katanya. Menurutnya, beberapa OPD saat ini sudah mulai menyadari penggunaan dana keistimewaan. Diharapkan, betul-betul ada sebuah koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem, terutama intervensi khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem di empat kapanewon.

"Diperlukan penanganan yang betul-betul terpadu dan berkelanjutan. Jadi pemanfaatan potensi dan mapping terhadap kebutuhan masyarakat bisa membuat mereka tidak miskin," tegasnya. (Rul)

RINGKASAN RKPD DAN APBD KULONPROGO 2023

Dukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan

WATES (KR) - Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, Pemkab Kulonprogo menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 40/2022.

Menurut Pj Bupati Kulonprogo, Drs Tri Saktiyana MSI, tema pembangunan Kulonprogo 2023, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas SDM yang Berkarakter dan Berbudaya, dengan mengambil empat prioritas pembangunan yaitu percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan perlindungan sosial, mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya, percepatan pembangunan infrastruktur daerah, optimalisasi tata kelola pelayanan publik.

Target kinerja pembangunan Tahun Anggaran 2023 terdiri lima tujuan daerah dan 11 sasaran daerah. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah didukung APBD yang telah ditetapkan dengan Perda Kulonprogo Nomor 9/2022 dan Perbup Nomor 60/2022. Pada TA 2023 pendapatan daerah ditargetkan Rp 1.602.783.129.755,00 yang terdiri PAD Rp 281.331.590.510,00 atau 17,55%, Pendapatan Transfer Rp 1.313.451.539.245,00 atau 81,95% serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 8.000.000.000,00 atau 0,50%.

"PAD Kulonprogo bersumber Pajak Daerah Rp 104.777.613.000,00 atau 37,24%, Retribusi Daerah Rp 10.718.221.842,00 atau 3,81% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 17.399.540.792,00 atau 6,18% serta Lain-lain PAD yang Sah Rp 148.436.214.876,00 atau 52,76%. Sedangkan Pendapatan Transfer berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 184.014.734.245,00 atau 14,01% dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1.129.436.805.000,00 atau 85,99%," kata Tri.

Adapun belanja daerah ditargetkan Rp 1.623.397.757.352,00 terdiri Belanja Operasi Rp 1.226.378.682.312,00 atau 75,54%, Belanja Modal Rp

208.796.398.853,00 atau 12,86%, Belanja Transfer Rp 180.461.919.384,00 atau 11,12%, Belanja Tidak Terduga Rp 7.760.756.803,00 atau 0,48%, Belanja Operasi terdiri Belanja Pegawai Rp 681.783.516.248,00 atau 55,59%, Belanja Barang dan Jasa Rp 453.377.579.260,00 atau 36,97%, Belanja Subsidi Rp 1.962.404.000,00 atau 0,16%, Belanja Hibah Rp 70.797.932.804,00 atau 5,77%, Belanja Bansos Rp 18.457.250.000,00 atau 1,51%.

Belanja Modal terdiri Belanja Tanah Rp 4.513.733.600,00 atau 2,16%, Belanja Peralatan dan Mesin Rp 63.371.881.553,00 atau 30,35%, Belanja Gedung dan Bangunan Rp 59.014.194.100,00 atau 28,26%, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 80.935.630.400,00 atau 38,76%, dan Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 704.259.200,00 atau 0,34% dan Belanja Aset Lainnya Rp 256.700.000,00 atau 0,12%. Belanja Transfer terdiri atas sebesar Belanja Bagi Hasil Rp 11.549.583.484,00 atau 6,40% dan Belanja Bantuan Keuangan Rp 168.912.335.900,00 atau 93,60%.

"Dengan nilai pendapatan dan belanja tersebut maka terjadi defisit Rp 20.614.627.597,00 yang ditutup dengan Pembiayaan Netto berasal dari Penerimaan Pembiayaan (SILPA tahun sebelumnya) Rp 53.487.820.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal) Rp 32.873.192.403,00," tambah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Eko Wisnu Wardhana SE.

Pada tahun anggaran 2023 alokasi anggaran yang dirinci berdasarkan kelompok Urusan Pemerintahan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 60,44%, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 9,45%, Urusan Pemerintahan Pilihan 3,25%, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 4,35%, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 20,44%, Unsur Penguasaan Urusan Pemerintahan 0,35%, Unsur Kewilayahan 1,46% serta Unsur Pemerintahan Umum 0,26%. (Rul)

88 Panwaslu Kalurahan/Desa Dilantik

WATES (KR)- Sebanyak 88 Panwaslu Kalurahan/Desa se-Kabupaten Kulonprogo resmi dilantik. Pelantikan Panwaslu Kalurahan/Desa dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan/Kapanewon dan dilaksanakan di kapanewon masing-masing. Dari total 381 pendaftar Panwaslu Kalurahan/Desa se-Kulonprogo, Panwaslu Kecamatan melakukan seleksi administrasi dan tes wawancara untuk mendapatkan 88 Panwaslu Kalurahan/Desa.

"Dari seluruh Panwaslu Kalurahan/Desa yang dilantik tersebut terdiri dari 50 laki-laki dan 38 perempuan. Setelah dilantik, mereka akan langsung mendapatkan pembekalan



KR-Istimewa

Pelantikan Panwaslu Kalurahan/Desa.

oleh Panwaslu Kecamatan tanggal 6 Februari 2023 yang kemudian dilanjutkan pembekalan yang akan diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 7-8 Februari 2023 mendatang," kata Ketua Ba-

waslu Kulonprogo Ria Harlinawati SIP MA, Selasa (7/2).

Bawaslu Kulonprogo berharap dengan telah dibentuknya jajaran pengawas pemilu di tingkat kalurahan/desa, maka pengawasan tahapan Pemilu

2024 akan lebih maksimal. Setelah dilantik, akan segera melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang akan segera dilaksanakan oleh jajaran KPU Kabupaten Kulonprogo sesuai ketugasannya dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2027.

"Selain itu Bawaslu Kulonprogo juga akan memberikan surat mandat kepada Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kalurahan/Desa untuk melaksanakan pengawasan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)," tambah Ria. (Wid/Rul)